

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kabupaten Semarang. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan. Perda No. 1 Tahun 2015.

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No.
165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

Indonesia. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. UU No. 11 Tahun 2009. LN No.
12 Tahun 2009. TLN No. 4967.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UU No. 21 Tahun 2007. LN No. 58 Tahun 2007. TLN No. 4720.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014. LN No.
297 Tahun 2014. TLN No. 5606.

Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU No. 12 Tahun
2022. LN No. 120 Tahun 2022. TLN No. 6792.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan
oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh
R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Buku

Alen, Andre dan Koen Muylle. *Compendium van het Belgisch Staatsrecht*.
Mechelen: Kluwer, 2010.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Heirbaut, Dirk. *An Introduction to Belgian Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Dokumen Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Universal Declaration of Human Rights. UDHR (1948).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. CEDAW (1984).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. ICESCR (1966).

Jurnal

Adhelia, Olivhien Huqmi. “Perjanjian Baku Menurut Perspektif Pengusaha, Konsumen, dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *UNES Law Review*. Vol. 5. No. 4 (2023).

Djarmiko, Andreas Andrie dan Dinar Ayu Marta. “Urgensi Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Arisan Online.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*. Vol. 2. No. 5 (2025).

Erlangga, Afga Samudera dan Kevin Hartono. “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi.” *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*. Vol. 1. No. 28 (2024).

Erungan, Erika Lehany, Meiske Tineke Sondakh, dan Jolanda Marlien Korua. “Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *E-Journal UNSRAT*.

Firda, Cholista Aulia. “Perlindungan Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi di Kawasan Karaoke Sukosari, Bawen, Kabupaten Semarang).” *Journal of Indonesian Law*. Vol. 3, No. 2 (2022).

- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5. No. 1 (2012).
- Gustavio, Daffa Farel, Ery Agus Priyono, dan Aminah. "Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST)." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 12. No. 1 (2023).
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 2 (2016). Juni.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1 (2019). April.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*. Vol. 3. No. 1 (2024). September.
- Lubis, Raka B. "Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024." (GoodStats) Raka B. Lubis. 30 Maret 2025. <https://goodstats.id/infographic/tingkat-pendidikan-masyarakat-indonesia-2024-BFsMy>. Diakses pada 30 November 2025.
- Maulida, Siti Rena dan Ahmad Syaufi. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 8. No. 6 (2025). Juni.
- Nabila, Andita Putri dan Gunawan Djayaputra. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak Dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 2 (2023). Desember.
- Nabila, Syadzwin Hindun. "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Hapusnya Perikatan Dengan Cara Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penitipan dan Penyimpanan." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. Vol. 3. No. 1 (2023).
- Noviarni, Dewi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Usaha." *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 4. No. 1 (2024).
- Pandit, I Gede Suranaya. "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1. No. 1 (2016).
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, dan Andini Elok Putri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya

- Nasional.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 2. No. 2 (2023).
- Rakhmah, Nur dan Bayu Pratama Putra. “Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Pekerja Seks Komersial di Makassar Sulawesi Selatan.” *UMI Medical Journal*. Vol. 1. No. 9 (2024). Juni.
- Ramli, Muh., Ahmadin, dan Bakhtiar. “Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 4. No. 4 (2025). Juni.
- Ramlot, Ninon. “From Legal Grey Area to Legal Recognition: Recent Legislative Reforms Regarding Sex Work Under Employment Contracts in Belgium.” *Osgoode Hall Law School of York University* (2025).
- Renalda, Audrina dan Afwa Suyudana. “Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Pekerja dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 6. No. 1 (2024). Maret.
- Riyanto, Mochamad dan Vitalina Kovalenko. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5. No. 2 (2023).
- R.M.S., Eben H. dan Dian A. W. “Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia.” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*. Vol. 8, No. 1 (2024).
- Sari, Meri Enita Puspita dan Diah Ayu Pratiwi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam.” *Jurnal Trias Politika*. Vol. 2. No. 2 (2018). Oktober.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 7. No. 2 (2017).
- Sitorus, Purnama Manda Sari dan Mhd. Yadi Harahap. “Eksistensi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Berdasarkan KUHPerduta.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No. 10 (2024).
- Surbakti, Debby Pratiwi, Suriani Siagian, dan Emmi Rahmiwita Nasution. “Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).” *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2 (2020). Juli – Desember.

- Suryawan, Ketut Bobby. "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 2. No. 3 (2025). Juni.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Merauke." *Jurnal Hukum Jatiswara*. Vol. 31. No. 2 (2016).
- Tanjaya, Willy, Heriyanti, dan Ega Triwi Wijaya. "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi." *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol. 9. No. 2 (2025). Juli.
- Valevi, Reza Rizky Rayan. "Representasi Moral dalam Film Keluarga Cemara." Skripsi Sarjana (Universitas Semarang, 2019).
- Widjaya, Nafisha Hanifa dan Arie Prasetio. "Motif dan Keterbukaan Diri Pekerja Seks dengan Keluarga (Studi Fenomenologi Pekerja Seks di Saritem, Kota Bandung dengan Keluarga dalam Pengungkapan Pekerjaan)." *E-Proceeding of Management*. Vol. 10. No. 6 (2023).
- Yulianti, Lulu, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* di Indonesia." *Risalah Hukum*. Vol. 15. No. 1 (2020). Juni.

Skripsi

- Dahliyus, M. "Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Dana Usaha pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sendayan Makmur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Studi Kredit Macet Tahun 2014)." Skripsi Sarjana (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).
- DJ, Reno Sanjaya. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.DUM." Skripsi Sarjana (Universitas Semarang, 2020).
- Masbaitubun, Maichel A. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual." Skripsi Sarjana (Universitas Pattimura, 2019).
- Syafi'i, Ahmad. "Sanksi Pelaku Mucikari Dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dan *Maqasid As-Syari'ah*)." Skripsi Sarjana (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

Makalah

Wijayanti, Titik. “Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Lisan.” Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2021).

Artikel Internet

Arbar, Thea Fathanah. “PSK Resmi Jadi Pekerja Formal Di Sini, Ada Pesangon Hingga Asuransi.” (CNBC Indonesia) Thea Fathanah Abrar. 7 Desember 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251207131514-4-691816/psk-resmi-jadi-pekerja-formal-di-sini-ada-pesangon-hingga-asuransi>. Diakses pada 6 Januari 2026.

Azhari, Risma. “Belgia Negara Pertama yang Sahkan UU PSK Revolusioner: Berhak Tolak Pelanggan, Cuti hingga Dana Pensiun.” (USS Feed) Risma Azhari. n.d. <https://ussfeed.com/belgia-negara-pertama-yang-sahkan-uu-psk-revolusioner-berhak-tolak-pelanggan-cuti-hingga-dana-pensiun/pop-culture/>. Diakses pada 17 Januari 2026.

BPS-Statics Indonesia. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen.” (Badan Pusat Statistik) BPS-Statics Indonesia. 25 Juli 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>. Diakses pada 30 November 2025.

BPS-Statics Indonesia. “Persentase Penduduk Miskin September 2024.” (Badan Pusat Statistik) BPS-Statics Indonesia. 15 Januari 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>. Diakses pada 23 Maret 2025.

BPS-Statics Indonesia. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,85 Persen. Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,33 Juta Rupiah.” (Badan Pusat Statistik) BPS-Statics Indonesia. 5 November 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-85-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>. Diakses 30 November 2025.

B, Santosh. “Understanding Labour Laws in Belgium: Contract, Wages, Working Hours, and Termination Rules.” (asanify.com) Santosh B. 13 Juli 2025. [https://asanify.com/blog/labour-laws/labour-laws-in-belgium-2025-guide/#:~:text=Suggested%20Read:%20EOR%20Belgium:%20Ultimate,of%20Record%20\(EOR\)%20in%20Belgium](https://asanify.com/blog/labour-laws/labour-laws-in-belgium-2025-guide/#:~:text=Suggested%20Read:%20EOR%20Belgium:%20Ultimate,of%20Record%20(EOR)%20in%20Belgium). Diakses pada 23 Januari 2026.

European Justice. “National Justice Systems.” (E-Justice Europe) European Justice. n.d. https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/legal-systems-eu-and-national/national-justice-systems/be_en#:~:text=Sweden-

.The%20judicial%20system,is%20a%20solely%20federal%20responsibility
.. Diakses pada 4 Januari 2026.

Hofman, Elwin. "From Stigma to Social Security: Belgium's Historic Shift on Sex Work." (The Low Countries) Elwin Hofman. n.d. <https://www.the-low-countries.com/article/sex-work/#:~:text=At%20the%20end%20of%202024,under%20specific%20conditions%20since%202000>. Diakses pada 23 Januari 2026.

International Planned Parenthood Federation. "Belgium: A Transformative Law for Sex Workers Rights." (ippf.org) International Planned Parenthood Federation. n.d. <https://www.ippf.org/featured-perspective/belgium-transformative-law-sex-workers-rights#:~:text=What%20is%20decriminalization%20in%20Belgium,of%20professional%20and%20personal%20life>.. Diakses pada 6 Januari 2026.

Kirkpatrick, Liedekerke Wolters Waelbroeck. "Dispute Resolution in Belgium." (Lexology) Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. 13 Juli 2018. https://www.lexology-com.translate.google/library/detail.aspx?g=c1d9eebe-fc90-493d-bb47-66a2174817dd&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc. Diakses pada 23 Januari 2026.

Korczak, Dimitri. "Pekerja Seks Kini Dapat Memiliki Kontrak Kerja Tetap di Belgia." (Euro News) Dimitri Korczak. 21 Juni 2024. https://www.euronews-com.translate.google/2024/06/21/prostitutes-can-now-have-regular-job-contracts-in-belgium?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc. Diakses pada 6 Januari 2026.

Law Gratis. "Hukum Perdata di Belgia." (LawGratis.com) Law Gratis. 24 Maret 2025. [https://www-lawgratis-com.translate.google/blog-detail/civil-laws-at-belgium-2?x_tr_sch=http&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=The%20Belgian%20Civil%20Code%20\(adopted,%2C%20family%20law%2C%20and%20inheritance](https://www-lawgratis-com.translate.google/blog-detail/civil-laws-at-belgium-2?x_tr_sch=http&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=The%20Belgian%20Civil%20Code%20(adopted,%2C%20family%20law%2C%20and%20inheritance).. Diakses pada 6 Januari 2026.

Law Teacher. "The Belgium Civil Law System." (LawTeacher.Net) Law Teacher. 2 Februari 2018. <https://www-lawteacher-net/free-law-essays/constitutional-law/the-belgium-civil-law-system-constitutional-law-essay.php#:~:text=Belgium%20is%20a%20federal%20state,common%20law%20has%20been%20modest>.. Diakses pada 6 Januari 2026.

Malliet, Christoph dan Francois Desseilles. "Panduan Penelitian Hukum Belgia." (GlobaLex) Christoph Malliet dan Francois Desseilles. September 2022. https://www-nyulaw-global-org.translate.google/globalex/belgium1.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=hukum%20kasus%20pajak.-

[3.%20Dokumentasi%20Hukum.Perdata%20\(yang%20telah%20diperbarui\).](#)
Diakses pada 17 Januari 2026.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Terpenuhi.” (Hukum Online) Bernadetha Aurelia Oktavira. n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>. Diakses pada 29 Desember 2025.

Oswaldo, Ignacio Geordi. “Belgia Tetapkan PSK Sebagai Pekerja Formal, Bisa Dapat Tunjangan Pensiun.” (Detik Com) Ignacio Geordi Oswaldo. 12 Desember 2024). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7683609/belgia-tetapkan-psk-sebagai-pekerja-formal-bisa-dapat-tunjangan-pensiun>. Diakses pada 27 Oktober 2025.

Perempuan, KOMNAS. “Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan Tahun 2023.” (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) KOMNAS Perempuan. n.d. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>. Diakses pada 23 Maret 2025.

Pirmez, Marie-Flore. “Why Belgium’s New Sex Worker Law Has Yet Change Life on the Street.” (The Brussels Times) Marie-Flore Pirmez. 2 Desember 2024. <https://www.brusselstimes.com/1334224/why-belgiums-new-sex-worker-law-has-yet-to-change-life-on-the-street>. Diakses pada 23 Januari 2026.

Quebec. “Definisi Eksploitasi Seksual.” (Quebec) Quebec. n.d. https://www-quebec-ca.translate.google/en/family-and-support-for-individuals/violence/sexual-exploitation/definition?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=c. Diakses pada 30 Januari 2026.

Ramadhan, Nanda Iriawan. “Pengertian Kemiskinan, Jenis, Penyebab, dan Dampaknya.” (Gamedia Blog) Nanda Iriawan Ramadhan. n.d. <https://www.gamedia.com/literasi/kemiskinan/?srsltid=AfmBOooP20tlfNxtfRpxNUy8SEw-3GPpQ-0FJOsVqioQiB9SEruAEUkL>. Diakses 24 Maret 2025.

Rohman, Muhammad Abdul. “Metode Penelitian Adalah, Manfaat, dan Jenis-Jenis Metode Penelitian.” (Sekolah Stata) Muhammad Abdul Rohman. n.d. <https://sekolahstata.com/metode-penelitian/>. Diakses pada 9 April 2025.

Salmaa. “Pengertian Metode Penelitian, Tujuan, Macam, dan Contoh Lengkapnya.” (DeepPublish) Salmaa. 9 Maret 2023. <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-metode-penelitian/>. Diakses pada 24 Maret 2025.

Suhendar. “Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Termiskin di Dunia, Ini Penyebabnya.” (Jabar VIVA) Suhendar. 19 Januari 2024.

<https://jabar.viva.co.id/news/18756-indonesia-masuk-daftar-10-negara-termiskin-di-dunia-ini-penyebabnya?page=1>. Diakses pada 23 Maret 2025.

Tim Hukum Online. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” (Hukum Online) Tim Hukum Online. 30 September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>. Diakses pada 29 Desember 2025.

UMSU, FISIP. “Teori Kesejahteraan Sosial.” (Fai Website) FISIP UMSU Website. 1 Desember 2021. <https://fisip.umsu.ac.id/teori-kesejahteraan-sosial/>. Diakses 23 Maret 2025.

Universitas Medan Area. “Asas-Asas Perjanjian.” (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area) Universitas Medan Area. 8 Januari 2021. <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>. Diakses pada 29 Desember 2025.

UNESA. “Perbedaan Metode Penelitian dan Metodologi Penelitian.” (Universitas Negeri Surabaya) UNESA. 18 Oktober 2024. <https://s2pendidikanbahasainggris.fbs.unesa.ac.id/post/perbedaan-metode-penelitian-dengan-metodologi-penelitian>. Diakses pada 9 April 2025.

UTSOPI. “Decriminalization.” (utsopi.be) UTSOPI. n.d. <https://www.utsopi.be/our-work/decriminalisation#:~:text=Achieving%20equal%20rights%20for%20sex,the%20law%20went%20into%20effect.>. Diakses pada 6 Januari 2026.